

newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 156, Juli 2022



Lemhannas RI Raih Opini WTP Ke-7 Kalinya



Sosialisasi Implementasi Aplikasi Srikandi guna mendukung G2G



FGD Menguatnya Ideologi Transnasional Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi



Gubernur Lemhannas RI Berkunjung ke Kementerian ESDM

Daftar Isi

- 2 Laporan SLISN PPRA 63
- 3 Penutupan Peningkatan Kapasitas Personel Lemhannas RI
- 4 Sosialisasi Implementasi Aplikasi Srikandi guna mendukung G2G
- 5 Pusat Laboratorium Lemhannas RI Lakukan Diseminasi di Provinsi Maluku Utara
- 6 FGD Menguatnya Ideologi Transnasional Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
- 7 Lemhannas RI Raih Opini WTP Ke-7 Kalinya
- 8 Selain Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat Juga Jadi Lokus Kajian Green Economy
- 9 Laksanakan SSDN Peserta PPRA 64 Kunjungi Empat Provinsi Berbeda
- 10 Paparan Manajemen dan Audit Keamanan SPBE di Lingkungan Lemhannas RI
- 11 Gubernur Lemhannas RI Menerima Audiensi PT. United Tractors Tbk
- 11 Gubernur Lemhannas RI Berkunjung ke Kementerian ESDM
- 12 Penjualan Hewan Kurban dalam Rangka Hari Raya Iduladha 1443 H/ 2022 M

Tim Redaksi

Penanggung Jawab Gathut Setyo Utomo
Redaktur Alton Endarwanto Hadi Susanto
Penyunting/Editor Bambang Iman Aryanto
Pembuat Artikel Naomi Augustina
Penerjemah Magista Dian Fitrilia
Desain Grafis Arini Maulidia
Fotografer Angga Mitra Tama
Sekretariat Dwi Ariyani, Endah Heliana,
Cahyaqadri Hildamona Permatasari, Gatot,
Maulida Arbaningsih

Alamat Redaksi

Biro Humas Settama Lemhannas RI,
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10,
Jakarta Pusat, 10110

Telp. (021) 3832108, 3832109
Email humas.lemhannasri@gmail.com
Website <https://www.lemhannas.go.id>

● Selasa, 28 Juni 2022

Laporan SLISN PPRA 63

Peserta PPRA 63 Lemhannas RI melaporkan hasil program Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) yang telah dilaksanakan ke Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Bali kepada Gubernur Lemhannas RI. Keempat kelompok menyampaikan laporannya di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI, pada Selasa (28/06/22).

Laporan pertama disampaikan oleh Kelompok SLISN Provinsi Kalimantan Utara yang dibawakan oleh Kadin Kearsipan, Pemprov Sumatera Selatan Prof. Dr. H.M. Edwar Juliarta, S.Sos., M.M. selaku pemapar dan Paban II Ops Sopsal Mabasal Mochammad Riza, S.E., M.Tr.Opsla selaku moderator. Paparan tersebut mengangkat judul “Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Melalui Program ‘Dokter Terbang’ di Kalimantan Utara”. Laporan dari Kelompok SLISN Provinsi Kalimantan Tengah yang dibawakan oleh Wadan Pasmar I Kormar Sugianto, S.Sos selaku pemapar dan Pamen Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Polri M. Sabilul Alif, S.H., S.I.K., selaku moderator. Paparan tersebut mengangkat judul “Kalimantan Tengah Menuju Ekonomi Biru”.

Laporan ketiga dari Kelompok SLISN Provinsi Kalimantan Barat yang dibawakan oleh Analisis Kebijakan Madya

Bidang Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Wisnu Putra, S.H., S.I.K., selaku pemapar dan Wakil Ketua Umum II Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) Nasional Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si., selaku moderator. Paparan yang diangkat kelompok SLISN Kalimantan Barat membahas tentang akselerasi pembangunan desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat yang berfokus pada pencapaian, tantangan, dan prospek. Laporan keempat dari Kelompok SLISN Provinsi Bali yang dibawakan oleh Direktur Bank Departemen Kebijakan Makroprudensial Indonesia Yanti Setiawan, S.E., M.M. selaku pemapar dan Direktur Doktrin Komando Pembinaan Doktrin Kodiklatl Dato Rusman S.N., S.E., M.Si., M.Tr.Opsla selaku moderator. Kelompok SLISN Provinsi Bali memberikan paparan dengan judul “Transformasi Menuju Ekonomi Hijau Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Provinsi Bali”.

Di akhir acara, Gubernur Lemhannas RI memberikan ulasan atas laporan SLISN yang diberikan peserta PPRA 63. Dirinya meminta agar PPRA 63 fokus untuk mencari best practice dalam penyelesaian isu strategis. “Kita bisa menawarkan standarisasi yang bisa diulang berkali-kali di waktu yang lain ditempat yang lain bisa dilakukan oleh orang lain”, tutur Gubernur.



● Selasa, 28 Juni 2022

Penutupan **Peningkatan Kapasitas Personel Lemhannas RI**

Peningkatan Kapasitas Personel Lemhannas RI dalam rangka Making Indonesia 4.0 Tahun 2022 resmi ditutup secara resmi oleh Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto pada Selasa (28/6/2022) di Gedung Dwiwarna Purwa, Lemhannas RI.

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P. dalam laporannya kepada Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa secara keseluruhan, Peningkatan Kapasitas Personel Lemhannas RI dalam rangka Making Indonesia 4.0 Tahun 2022 telah berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan rencana. Para peserta telah mengikuti kegiatan secara aktif dan sungguh-sungguh dan berhak mendapatkan sertifikat kelulusan. “Diharapkan para peserta dapat ikut memajukan Lemhannas RI serta

berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” ungkap Deputi Pendidikan.

“Kita melakukan pelatihan ini antara lain untuk mendobrak kekakuan, supaya bisa mengubah mental block. (Peningkatan kapasitas) Strukturnya menghasilkan satu metode yang bisa diikuti, tapi jangan sampai strukturnya malah menciptakan kekakuan baru yang akhirnya menciptakan mental block baru,” ucap Gubernur Lemhannas RI saat memberikan sambutannya.

Lebih lanjut, Gubernur juga menyampaikan bahwa tantangan setelah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas adalah bagaimana menerapkannya pada pekerjaan sehari-hari. Misalnya pada Kedeputusan Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional untuk melakukan transformasi kurikulum. Kemudian Kedeputusan Pengkajian Strategik agar hasil kajian bisa lebih cepat dan tepat

dalam menyelesaikan masalah-masalah. Selanjutnya Kedeputusan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dapat menggunakan Theory U, yang merupakan materi utama dalam peningkatan kapasitas personel kali ini, dalam melakukan transformasi. “Pada kesekretariatan, program yang sangat besar mulai dari pembinaan karir personel, perencanaan keuangan, dan program lainnya,” ucap Gubernur.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Personel Lemhannas RI dalam rangka Making Indonesia 4.0 Tahun 2022. “Saya berharap dari teman-teman yang melakukan pelatihan ini bisa menawarkan bagaimana kita melakukan transformasi,” pungkasnya.



● Selasa, 28 Juni 2022

Sosialisasi Implementasi Aplikasi Srikandi guna mendukung G2G

Lemhannas RI menyelenggarakan Sosialisasi Pengimplementasian Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada Selasa (28/6/2022) di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra, Lemhannas RI. Sosialisasi Srikandi tersebut menghadirkan Arsiparis Muda Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Azwar Sanusi, S.I.P., M.Si. selaku narasumber.

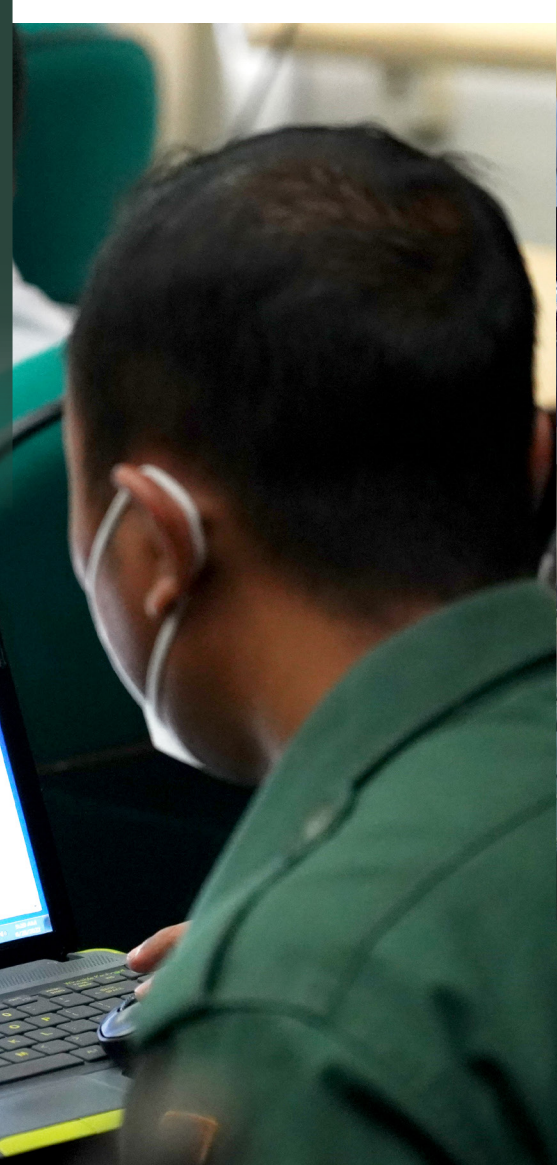
Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Purwadi, M.Tr (Han). dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan penerapan aplikasi Srikandi, proses administrasi tidak akan terbatas jarak dan waktu. "Artinya dimanapun dan kapanpun, proses administrasi dapat dilakukan," kata Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama.

Aplikasi Srikandi merupakan hasil kolaborasi antara Kemenpan RB, Kominfo, BSSN, dan ANRI yang bertujuan mewujudkan Government to Government (G2G). Sebagai aplikasi bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat, proses bisnis, standar

data, dan keamanan data Srikandi sudah terstandar dan terintegrasi sesuai dengan yang telah ditetapkan Kominfo dan sudah dikembangkan oleh ANRI.

Standarisasi dan pengembangan tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara daring serta terintegrasi. Arsiparis Muda ANRI Azwar Sanusi, S.I.P., M.Si. pada kesempatan tersebut memandu langsung para peserta dalam menggunakan aplikasi Srikandi. Lebih lanjut, dilakukan juga pelengkapan data dalam portal srikandi.layanan.go.id. "Diharapkan yang hadir disini akan menjadi agen dalam unit kerja," jelasnya.

Dalam mendukung implementasi SPBE, Lemhannas RI juga telah membangun 30 sistem aplikasi. Dengan sudah terbangunnya SPBE di Lemhannas RI, diharapkan dapat terwujud tata kelola yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Lemhannas RI juga dalam proses implementasi aplikasi Srikandi.



● Kamis, 29 Juni 2022

Pusat Laboratorium Lemhannas RI Lakukan Diseminasi di Provinsi Maluku Utara

Pusat Laboratorium Lemhannas RI melakukan Diseminasi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional pada Rabu dan Kamis, (29–30/6/2022) di Provinsi Maluku Utara.

Sebelum melaksanakan kegiatan diseminasi Pusat Laboratorium Lemhannas RI yang dipimpin Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P. melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Hotel

Sahid Bella Ternate Provinsi Maluku Utara yang diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. Samsuddin Abdul Kadir. Turut hadir mendampingi Sekda Provinsi Maluku Utara, yaitu Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Abuhari Hamzah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Maluku Utara Ir. Sri Haryanti Hatari, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara Salmin Janidi, S.H., M.Hum.

“Kondisi ketahanan nasional Republik Indonesia harus senantiasa dipantau untuk mewaspadai dan menjaga agar kondisi ketahanan nasional Republik Indonesia senantiasa selalu berada pada kondisi yang sangat aman,” kata Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI. Menurutnya, dengan selalu memantau dan mengetahui kondisi ketahanan nasional, pemerintah dapat mengambil langkah dan upaya strategis dengan melakukan penguatan pada aspek-aspek tertentu yang dinilai masih lemah. Penguatan dilakukan melalui program-program pembangunan nasional pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI menyampaikan bahwa dalam hal pembinaan ketahanan nasional di Provinsi Maluku Utara telah diakomodasi dengan Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dengan Provinsi Maluku Utara Nomor: PKS/41/XII/2009 Tanggal 16 Desember 2009 tentang Kerja Sama dalam rangka Peningkatan dan Pengembangan Ketahanan Nasional Provinsi Maluku Utara. Namun, sejak akhir tahun 2014 masa berlaku nota kesepahaman tersebut sudah berakhir. Oleh karena itu, saat ini kembali dijajaki perjanjian kerja sama mengenai data sharing dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data sistem pengukuran Ketahanan Nasional Provinsi Maluku Utara antara Pusat Laboratorium Lemhannas RI dengan Bappeda Provinsi Maluku Utara.

“Diharapkan kegiatan ini akan lebih mempermudah dan memperlancar kegiatan uji coba dan integrasi data pengukuran ketahanan nasional Provinsi Maluku Utara dengan basis data kabupaten/kota yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023,” pungkas Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI.



Rabu, 29 Juni 2022 ●

FGD Menguatnya Ideologi Transnasional Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto membuka Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang bersama dengan Polda Bali yang mengangkat tema “Menyikapi Menguatnya Ideologi Transnasional dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi” pada Rabu (29/6/22), di Hotel Kartika Plaza Denpasar.

Kegiatan pengumpulan data dukung kajian dilaksanakan hingga Minggu (3/7/2022). Selama enam hari berada di Bali, tim pengkajian Lemhannas RI melakukan beberapa FGD dengan berbagai pihak, yaitu dengan Pemerintah Provinsi Bali, Polda Bali, Kodam IX/Udayana, dan Universitas Udayana. Dalam FGD tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan pilar-pilar penting dalam menyikapi ideologi transnasional yang sudah mulai didapatkan. “Yang harus

kita kaji secara objektif adalah jangan sampai yang kita dapatkan sebagai pilar-pilar masih berada dalam tataran retorik sehingga sulit untuk diimplementasikan dalam kerangka yang lebih operasional,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Menurut Gubernur, harus ditemukan metode dan wadah kelompok seperti apa yang membuat ideologi transnasional semakin berkembang. “Kita bisa mengkaji apakah ide transnasional itu hadir secara lunak di bawah kesadaran atau pengawasan kita, karena dia hadir dalam bentuk budaya, dia hadir dalam bentuk brand, dia hadir dalam bentuk event-event yang tidak kita duga ternyata menjadi wadah untuk penyebaran ide transnasional. Itu yang ingin kami dapatkan,” jelas Gubernur Lemhannas RI.

Hadir dalam FGD tersebut selaku narasumber, yakni Wakapolda Bali Brigjen

Pol. Drs. Ketut Suardana, M.Si., Rektor Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa Prof. Dr. Drs. I. Gusti Ngurah Sudiana, M.Si., Dosen Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.Hum., Ketua Yayasan Korpri Bali yang juga merupakan Dosen Ilmu Administrasi Negara dan Magister Administrasi Publik Unwar Dr. A. A. Oka Wisnu Murti, M.Si., Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P., dan Sekretaris Majelis Desa Adat Provinsi Bali Dr. Drs. I Made Wena, M.Si.

Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. dalam laporannya kepada Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa Provinsi Bali dipilih menjadi lokus penelitian karena memiliki dinamika dan karakteristik yang unik dalam kondisi sosial politik masyarakat, sehingga menarik untuk dilakukan kajian strategis secara komprehensif. Penyusunan kajian juga akan dilanjutkan untuk pendalaman materi dan pengumpulan data kajian di lokus Sumatera Selatan yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 mendatang.



Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 pada Kamis (30/6/2022), di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dirinya menerima langsung LHP atas LKKL Tahun 2021 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diserahkan oleh Anggota I BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.

• Kamis, 30 Juni 2022

Lemhannas RI Raih Opini WTP Ke-7 Kalinya

I Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa metode yang digunakan BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan dalam pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kualitas laporan keuangan terklasifikasi dalam empat jenis opini, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan

Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat. Lemhannas RI berturut-turut meraih Opini WTP sejak 2015, dan tahun ini merupakan kali ke-7 Lemhannas RI berhasil meraih Opini WTP.

“Kami menyampaikan selamat kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga beserta seluruh jajarannya atas komitmen dan upayanya sehingga tahun ini berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Seraya mengingatkan agar terus bekerja keras sehingga dapat mempertahankan opini tersebut ditahun-tahun ke depan,” tutur Anggota I BPK tersebut.

Gubernur Lemhannas RI mewakili Menko Polhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. memberikan sambutan dalam kesempatan tersebut. Dirinya mengucapkan terima kasih atas pendampingan yang dilakukan oleh AKN I BPK sehingga laporan hasil pemeriksaan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk semua Kementerian/Lembaga yang hadir. “Tentunya untuk kami, seperti yang disampaikan oleh Presiden, Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan melainkan prasyarat dasar bagi kami untuk peningkatan institusi,” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan agar setiap Kementerian/Lembaga yang berada di lingkungan AKN I menyadari tantangan besar yang akan dihadapi. Hal tersebut khususnya akan dihadapi pada tahun 2023 dan menyambut tahun politik pada tahun 2024. “Semoga pengawasan dari BPK kepada kami saat menghadapi tantangan yang akan meningkat tahun 2023 menuju tahun politik 2024 akan tetap dilakukan,” pungkas Gubernur Lemhannas RI.





Senin, 4 Juli 2022 ●

Selain Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat Juga Jadi Lokus Kajian Green Economy

Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam (SKA) Kedeputan Pengkajian Strategik Lemhannas RI kembali menyelenggarakan pengumpulan data kajian jangka panjang yang berjudul “Implementasi Green Economy dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional” selama lima hari (4-8/7/2022) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selama berada di NTB, rombongan Lemhannas RI berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan dan kebijakan serta melakukan peninjauan

lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Lemhannas RI melangsungkan diskusi dengan PT. PLN Unit Induk Wilayah NTB, PT. Vena Energy Indonesia, Dosen Fakultas Teknik Univ. Mataram, dan Pemerintah Provinsi NTB yang didahului dengan courtesy call dengan Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI menjelaskan pada tahun 2022, Lemhannas RI melaksanakan program kajian jangka panjang yang berjudul Implementasi Green Economy dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. “FGD di Lokus Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan rangkaian kegiatan pendalaman materi kajian jangka panjang Direktorat Ekonomi dan SKA Debidjianstrat, sebagai upaya untuk mendapatkan data dan fakta riil sesuai kondisi di lapangan tentang green economy,” kata Deputi Pengkajian.

Diharapkan pengumpulan data di Provinsi NTB akan menghasilkan berbagai informasi, data dan masukan sehingga dapat menjawab pertanyaan dari kajian

yang disusun, yakni apa permasalahan dan kendala yang dihadapi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta dalam mengoptimalkan implementasi green economy dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Informasi dan masukan yang dapat menjawab kedua pertanyaan tersebut akan menjadi rekomendasi terhadap persoalan implementasi green economy dalam kajian yang disusun Lemhannas RI.

Keberangkatan Lemhannas RI ke NTB dipimpin oleh Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. yang didampingi oleh Tenaga Profesional Bidang SKA dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., Tenaga Profesional Bidang SKA Lemhannas RI Dr. Ir. Muhammad Hanafi, M.B.A., IPM., Direktur Pengkajian Ekonomi dan SKA Lemhannas RI Brigjen TNI Dedy Jusnar Hendrawan, Manager of Energy Management PT. Vale Indonesia Ir. Muhammad Ridwan Tandiar, S.T., M.T., IPU. CEM. Dan Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rahmi Afzhi.

● Senin, 4 Juli 2022

Laksanakan SSDN Peserta PPRA 64 Kunjungi Empat Provinsi Berbeda

Peserta PPRA 64 Lemhannas RI melaksanakan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) selama lima hari, yakni (4-8/7/2022). Pada pelaksanaan SSDN PPRA 64, para peserta dibagi menjadi empat kelompok untuk mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Maluku.

Pimpinan Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto, Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Purwadi Arianto, M.Si. dan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P. turut mendampingi peserta PPRA 64 ke masing-masing lokus.

Kegiatan SSDN merupakan metode pembelajaran dengan melakukan praktik lapangan berupa kunjungan studi strategis. Pelaksanaan SSDN bertujuan untuk membekali Peserta PPRA 64 Lemhannas RI suatu pengalaman meneliti secara langsung terhadap berbagai persoalan di daerah melalui kunjungan studi, audiensi, dan diskusi sesuai topik permasalahan yang dipilih. Diharapkan para peserta memiliki cakrawala berpikir yang komprehensif, holistik, dan integratif mengenai kondisi objektif daerah yang dikunjungi yang merupakan bagian integral dari NKRI.

Selama lima hari berada di empat provinsi berbeda, masing-masing rombongan melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah berkunjung dan berdiskusi dengan unsur pemerintah daerah serta meninjau objek unggulan daerah tersebut. Setelah melaksanakan SSDN, para peserta PPRA 64 Lemhannas RI menyusun laporan yang mengkaji permasalahan dari masing-masing daerah disertai rekomendasi strategis yang aplikatif. Pelaporan tersebut disampaikan ke Gubernur Lemhannas RI.



Selasa, 5 Juli 2022 ●

Paparan Manajemen dan Audit Keamanan SPBE di Lingkungan Lemhannas RI

Biro Telematika Lemhannas RI melaksanakan rangkaian Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan materi pembahasan Manajemen Keamanan SPBE dan Audit Keamanan SPBE pada Selasa (05/07/2022) yang dilakukan secara daring. Hadir sebagai narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yaitu Sandiman Ahli Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan Pusat Danang Jaya, S.Si., M.Kom dan Manggala Informatika Ahli Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat Tosany Sofyan Harnowo, S.Pd.

Mengawali paparannya, Sandiman Ahli Madya BSSN mengulas berbagai

landasan hukum dan regulasi yang mengatur tata kelola SPBE di lingkungan kementerian dan lembaga. Dirinya juga menyampaikan pilar manajemen dan standar keamanan SPBE. "Didalam penetapan ruang lingkup tentu perlu dipertimbangkan hal hal yang berkaitan dengan isu-isu internal keamanan informasi didalam organisasi itu sendiri," tutur Sandiman Ahli Madya BSSN.

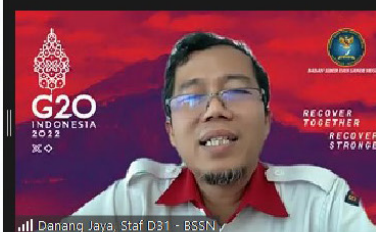
Dalam perencanaan manajemen keamanan informasi disusun berdasarkan kategori resiko keamanan SPBE dan ditetapkan target realisasi program kerja yang meliputi edukasi, penilaian, peningkatan, penanganan insiden dan audit terhadap keamanan SPBE. Terkait dukungan pengoperasian, Sandiman Ahli Madya

BSSN memaparkan harus fokus pada kompetensi sumber daya manusia (SDM) khususnya tim teknologi informasi (TI) pada instansi dan anggaran keamanan SPBE. Lebih lanjut terkait evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan manajemen keamanan SPBE dan penerapan standar keamanan SPBE dilaksanakan oleh koordinator SPBE instansi pusat dan koordinator pemerintah daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun. "Setelah dievaluasi harapannya ada perbaikan berkelanjutan," ujar Sandiman Ahli Madya BSSN.

Sandiman Ahli Madya juga menyimpulkan bahwa hasil audit TIK keamanan SPBE memiliki tiga level: tidak memadai; perlu peningkatan; dan memadai. Untuk mendapatkan kesimpulan audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud harus menjalankan matriks kesimpulan audit keamanan SPBE, yaitu pada hasil evaluasi desain pengendalian, hasil evaluasi implementasi pengendalian dan hasil pengujian terinci efektivitas pengendalian.



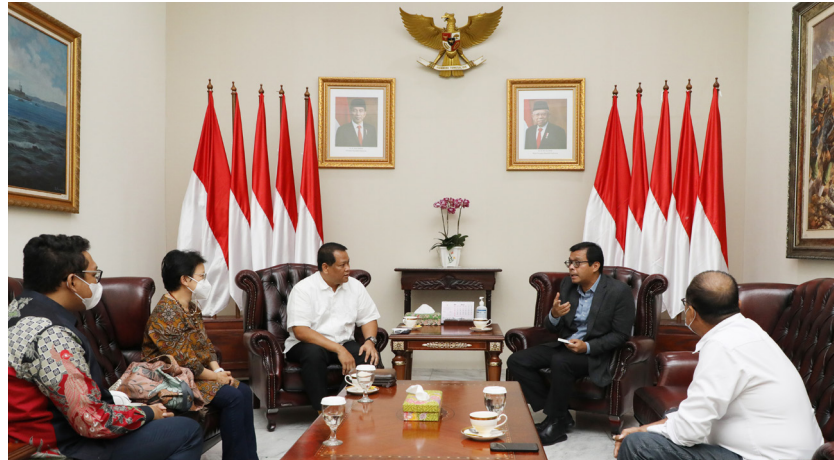
The slide features a white background with decorative scrollwork in the corners. At the top center, there are two logos: the Garuda Pancasila on the left and the BSSN logo on the right. Below the logos, the main title "Manajemen Keamanan SPBE & Audit Keamanan SPBE" is displayed in a large, bold, black font. Underneath the title, the name "Danang Jaya" is written in a smaller font, followed by "Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat". At the bottom, it states "Disampaikan pada Sosialisasi SPBE di Lingkungan Lemhannas, 5 Juli 2022".



Jumat, 8 Juli 2022 ●
Gubernur
Lemhannas RI
Menerima **Audiensi**
PT. United Tractors
Tbk

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menerima audiensi dari Direktur PT United Tractors Tbk Edhie Sarwono yang didampingi Head of CGS Sara K. Loebis, Security Department Head Dwi Anggono, dan General Affair Department Head Bagus Setiawan pada Jum'at (08/07/2022) di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Direktur PT United Tractors Tbk menyampaikan bahwa PT. United Group Tractors Tbk memiliki forum eksekutif yang melakukan pengoperasian pada enam lini bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, Edhie Sarwono menyampaikan perlu adanya upaya membangkitkan rasa bela negara bagi forum eksekutif di PT United Tractors Tbk. Dirinya merasa hal yang tepat bagi



forum eksekutif untuk diberikan wawasan terkait perkembangan geopolitik dan geostrategi posisi Indonesia saat ini. Mengingat pada tingkat eksekutif juga sudah banyak diisi generasi muda yang perlu mendapatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dalam berbisnis.

Gubernur menerima dengan baik audiensi yang dilakukan dan memberikan konfirmasi kehadiran sebagai pembicara dalam seminar di PT United Tractors

pada Jum'at (15/07/2022). Pada kesempatan yang sama dirinya juga menyampaikan terkait fokus Lemhannas RI terhadap lima kajian yakni ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, konsolidasi demokrasi, dan ketahanan IKN. Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan akan mengkaji potensi krisis di industri, dan pada tahun ini fokusnya ke industri yang terkait ke industri supply chain. "Ketahanan nasional itu akan teruji saat kita mampu mencegah krisis," pungkas Gubernur Lemhannas RI.



Jumat, 8 Juli 2022 ●
Gubernur Lemhannas RI
Berkunjung ke **Kementerian ESDM**

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto bersama Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., mengunjungi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rombongan Lemhannas RI disambut langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada Jum'at (08/07/2022) di Ruang Marore, Kementerian ESDM, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa Lemhannas RI diminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengkajian pada bidang ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, konsolidasi demokrasi, dan Ketahanan IKN. Hal yang difokuskan berkaitan dengan Kementerian ESDM, yakni ekonomi hijau

dengan proyeksi pembangunan IKN sebagai kota hijau.

Gubernur menyampaikan bahwa ada beberapa karakter khas dari pengkajian yang Lemhannas RI lakukan salah satunya adalah membuat komparasi posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia, termasuk ada indeksnya seperti indeks polusi dan indeks peralihan transisi energi terbarukan. Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa Lemhannas RI juga diminta mempelajari terkait antisipasi krisis energi dan pangan oleh Presiden Joko Widodo.

Di kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan untuk kawasan industri di Indonesia juga perlu dilakukan perubahan yang salah satunya membutuhkan hidrogen. Hidrogen ini bisa jadi pengganti batu bara dan gas alam. Hal ini berkaitan dengan peralihan transisi energi terbarukan. Turut hadir mendampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif, Prof., Dr., Ir., Irwandy Arif, M.Sc. dan Ir. Agus Tjahajana Wirakusumah, S.E, M.Sc selaku Staf Khusus Menteri ESDM.



Senin, 11 Juli 2022 ●

Penyembelihan Hewan Kurban dalam Rangka Hari Raya Iduladha 1443 H/2022 M

Dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1443 H, Lemhannas RI menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban di Lapangan Tengah Lemhannas RI pada Senin, (11/7/2022). Pada tahun ini Lemhannas RI mengangkat tema “Memaknai Iduladha sebagai Wujud Kepatuhan, Kesabaran, dan Keikhlasan guna Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah SWT”.

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa Hari Raya Iduladha merupakan hari raya yang sangat penting bagi umat Muslim. Menurutnya, Iduladha dapat dimaknai sebagai pengorbanan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim yang menunjukkan kepatuhan, kesabaran, dan keikhlasan ketika diminta untuk mengorbankan putranya, yakni Nabi Ismail. “Hal tersebut bisa menjadi nilai utama dan nilai teladan bagi kita untuk melakukan pengorbanan,” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur juga menyampaikan kata pengorbanan yang setidaknya memiliki dua bentuk dalam Bahasa Inggris, yaitu sacrifice dan redemption. Menurutnya, redemption memiliki makna yang lebih dalam. “Redemption adalah ketika betul-betul tidak menghiraukan apa dampaknya bagi diri sendiri dan juga tidak tau apa untungnya bagi diri sendiri. Ketika melakukan pengorbanan tersebut, itu dalam arti redemption,” jelas Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lemhannas RI berharap tiga kata kunci yang ditekankan pada tema, yakni Kepatuhan, Kesabaran, dan Keikhlasan dapat dilaksanakan dengan baik. “Karena kita yakin otoritas yang memberikan perintah itu jauh lebih tahu dari kita, yang tentunya memahami betul apa yang terbaik bagi kita,” pungkas Gubernur menutup sambutannya.

Pih. Karoum Settama Lemhannas RI Kolonel (Mar) Agustiawarman, S.H. selaku Ketua Panitia Peringatan Iduladha 1443 H/2022 M dalam laporannya menyampaikan bahwa Lemhannas RI menerima hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Daging kurban akan didistribusikan kepada 1.228 orang, terdiri dari 702 orang personel Lemhannas RI dan 526 orang masyarakat disekitar lingkungan Lemhannas RI. Penyembelihan hewan kurban di Lemhannas RI dihadiri oleh personel Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Pusat guna mengecek kelayakan dan kesehatan hewan kurban.